

**PERAN ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM
MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT
MELALUI KEGIATAN RESES
(Studi Kasus di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**GRISELDA MAYA AZ-ZAHRA
NPM 2016011057**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PERAN ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM
MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT
MELALUI KEGIATAN RESES
(Studi Kasus di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**GRISELDA MAYA AZ-ZAHRA
NPM 2016011057**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN RESES (Studi Kasus di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung)

Oleh

Griselda Maya Az-zahra

Anggota DPRD Provinsi Lampung diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Dengan rumusan masalah Bagaimana peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat dan Apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung yang dihadapi anggota DPRD Provinsi Lampung di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Teori komunikasi politik Harold Laswell sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyoroti peran anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai komunikator. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pembuat peraturan, pengawas, keuangan, dan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perantara komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini melibatkan penerimaan aspirasi, penyampaian informasi, sosialisasi, serta menjadi wadah diskusi melalui kegiatan reses. Secara umum, peran anggota DPRD Provinsi Lampung di Dapil 1 dalam menyuarakan aspirasi sudah cukup optimal, meskipun belum semua aspirasi dapat terpenuhi. Beberapa faktor pendukung kegiatan reses melibatkan komunikasi yang efektif, alokasi anggaran untuk sarana prasarana reses, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat. Faktor penghambat yang dihadapi anggota DPRD Provinsi Lampung melibatkan keterbatasan anggaran APBD untuk merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat, keterbatasan waktu dalam mencakup semua wilayah, dan kurangnya pemahaman politik masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Kata Kunci : Peran, DPRD, Aspirasi Masyarakat, Reses

ABSTRACT

THE ROLE OF LAMPUNG PROVINCE DPRD MEMBERS IN ABSORBING COMMUNITY ASPIRATIONS THROUGH RECESS ACTIVITIES (Case Study in Electoral District 1 Bandar Lampung City)

By

Griselda Maya Az-zahra

Members of the Lampung Province DPRD, among others, have the obligation to absorb and follow up on community aspirations through recess activities. With a problem formulation, what is the role of members of the Lampung Province DPRD in absorbing the aspirations of the community and what are the inhibiting and supporting factors faced by members of the Lampung Province DPRD in electoral district 1, Bandar Lampung City. This research uses qualitative research methods. Harold Laswell's political communication theory as the theoretical basis for this research.

The research results highlight the role of Lampung Province DPRD members as communicators. They not only function as makers of regulations, supervisors, finance and legislation, but also as communication intermediaries between society and the government. This involves accepting aspirations, conveying information, socializing, as well as being a forum for discussion through recess activities. In general, the role of Lampung Province DPRD members in Electoral District 1 in voicing aspirations is quite optimal, although not all aspirations can be fulfilled. Some of the inhibiting factors faced by members of the Lampung Province DPRD involve limited APBD budgets to realize all community aspirations, limited time to cover all areas, and the community's lack of political understanding of the government system. Meanwhile, supporting factors for recess activities involve effective communication, budget allocation for recess infrastructure, active community participation, and collaboration with community leaders.

Keywords: Role, DPRD, Community Aspirations, Recess

**Judul : PERAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENYERAP ASPIRASI
MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN
RESES (Studi Kasus Di Daerah Pemilihan 1
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Griselda Maya Az-zahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016011057

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Anita Damayantie, M.H.
NIP. 196903041994032002

2. Ketua Jurusan


Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

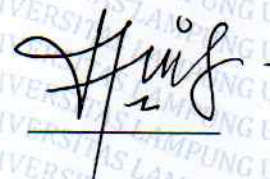
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Anita Damayantie, M.H.**



Penguji Utama : **Azis Amriwan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Ujian Skripsi: **07 Februari 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2) Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
- 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 07 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Onseda Maya Az-zahra

NPM. 2016011057

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Griselda Maya Az-zahra, yang dilahirkan di Bandar Lampung, 09 Januari 2003. Penulis merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara, yang merupakan putri dari Ibu Masitah dan Bapak M.Yazid Wijaya. Pendidikan dasar ditempuh di SD Tamansiswa dan diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya sekolah menengah pertama di tempuh di SMPN 16 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2017 dan sekolah menengah atas di SMKN 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tahun 2020 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Pengabdian Masyarakat pada tahun 2021 dan anggota Media pada tahun 2022-2023 (HMJ Sosiologi), serta menjadi bagian dari anggota English Society (UKM-U Eso Unila) tahun 2021-2023. Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parda Suka Kecamatan Parda Suka, Kabupaten Pesisir Barat pada gelombang 1 tahun 2023. Penulis melaksanakan program Magang/PKL di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung selama enam bulan pada tahun 2023 .

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu.

Dan bisa jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“A year ago you didn't know today, you didn't know how you'd make it here, but you made it here, so please, no matter how hard you find your days, keep going.”

(Griselda)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

Keluarga

Penulis mempersembahkan skripsi yang telah disusun ini kepada kedua orang tua, Ibu Masitah dan Bapak M.Yazid Wijaya, serta kepada abang, M. Aldrian Wijaya yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran, dan do'a yang tiada henti senantiasa mengiringi langkah penulis.

Para pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan. Ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh dari Bapak/Ibu Dosen sangat berharga.

Teman-Teman

Untuk teman baik penulis, terima kasih telah memberikan arahan, dukungan, motivasi, dan selalu ada dalam suka maupun duka.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses (Studi Kasus di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung)". Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya usaha maksimal, bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orangtua yang saya sayangi dan banggakan, Ibu Masitah dan Bapak M.Yazid Wijaya, terima kasih selalu mendoakan tiada henti, didikan yang berharga, memberi dukungan, pengorbanan yang tak terhitung dan kasih sayang yang telah diberikan.
3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Ibu Drs. Ida Nurhida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. Selaku ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
6. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.

7. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih kepada ibu yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan dan memberikan saran serta masukan yang bermanfaat dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ibu kesehatan, dan semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT aamiin.
8. Bapak Aziz Amriwan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji skripsi. Terima kasih untuk masukan, saran dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
9. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan dari awal perkuliahan hingga selesai, semoga bapak selalu siberikan kesehatan dari Allah AWT aamiin.
10. Segenap dosen di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi dan staff administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu melayani keperluan administrasi.
11. Terima kasih untuk my brosky M.Aldrian Wijaya, atas segala pengertian, selalu memberikan nasihat, semangat dalam proses kuliah dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Without you, i'd be lost. Thank you so much for everything.
12. Teman-teman Jurusan Sosiologi angkatan 2020 yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga proses wisuda. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga. Semoga kesuksesan menyertai kita semua aamiin.
13. Teman-temanku di Sosiologi Mesia Rohbani, Aliya Rahmadewi, Qintara Faiza R, Citra Shafira, Assca Assbinna, Defita Zaharani, Maya Miranti dan lainnya. Terimakasih atas segala dukungan , pendengar segala keluh kesah,

suka maupun duka selama proses perkuliahan, magang, dan penyusunan skripsi hingga selesai. Semoga kita selalu tetap menjalin silaturahmi yang baik dan kesuksesan menyertai kita aamiin.

14. Teman-temanku sejak sekolah yang bertahan sampai sekarang Saffanah Zahra, Nanda Okta Dwiyanti, Rika Fitriana, Norma Tiara. Terimakasih atas canda tawa, suka maupun duka, dukungan, dan bantuan yang kalian berikan kepada penulis.
15. Teman-teman KKN Mita, Ratu, Ulfa, Agung, Evan, dan Michael. Terima kasih untuk kebersamaannya selama sebulan KKN di Desa Parda Suka, canda tawa, suka maupun duka, dan kejadian seru lainnya selama KKN. Semoga kita menjalin silaturahmi yang baik.
16. Untuk HMJ Sosiologi. Terimakasih untuk segala kesempatan yang diberikan kepada penulis hingga dapat mengembangkan diri dan memiliki banyak pengalaman. Semoga HMJ Sosiologi Universitas Lampung selalu menjadi wadah anggotanya untuk mengembangkan *skill* pada bidang-bidang yang telah mereka pilih.

Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT membalas semua kebaikan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 07 Februari 2024
Penulis

Griselda Maya Az-zahra

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Tentang Peran.....	7
2.1.1 Pengertian Peran	7
2.1.2 Pembagian Peran	8
2.1.3 Unsur-unsur Peran	9
2.1.4 Jenis Peran.....	9
2.1.5 Dimensi Peran	10
2.2 Tinjauan Tentang Reses	11
2.2.1 Pengertian Reses.....	11
2.2.2 Tujuan Reses	11
2.2.3 Tahapan dan Pelaksanaan Reses.....	12
2.3 Tinjauan Tentang DPRD	14
2.3.1 Pengertian DPRD	14
2.3.2 Fungsi DPRD	14
2.3.3 Tugas dan Wewenang DPRD.....	16
2.4 Hak yang dimiliki DPRD	17

2.5 Aspirasi Masyarakat	18
2.6 Penyerapan Aspirasi Masyarakat	19
2.7 Landasan Teori.....	21
2.7.1 Teori Komunikasi Politik	21
2.8 Penelitian Terdahulu	23
2.9 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Jenis Sumber Data.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.8 Keabsahan Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	35
4.1.1 Sejarah Kota Bandar Lampung	35
4.1.2 Visi, Misi, dan Arti Logo Kota Bandar Lampung	36
4.1.3 Geografi Kota Bandar Lampung	36
4.1.4 Kependudukan Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.5 Angkatan Kerja.....	38
4.1.6 Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung.....	39
4.2 Gambaran Umum DPRD Provinsi Lampung	40
4.2.1 Profil DPRD Provinsi Lampung.....	40
4.3 Profil Informan.....	43
BAB V HASIL PEMBAHASAN	47
5.1 Hasil Penelitian	47
5.1.1 Peran anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung	47

5.1.2	Faktor Pendukung Anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung	82
5.1.3	Faktor Penghambat Anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung	86
5.2	Pembahasan	91
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		95
6.1	Kesimpulan	95
6.2	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....		99
LAMPIRAN		102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Kecamatan dan Jenis Jenis Kelamin Tahun 2022 Kota Bandar Lampung	37
Tabel 4.2 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan	38
Tabel 4.3 Distribusi Presentase PDRB (Persen), 2021-2022	39
Tabel 4.4 Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung	40
Tabel 4.5 Profil Informan.....	45
Tabel 5.1 Who (Siapa Komunikatornya)	52
Tabel 5.2 Say What (Mengatakan Apa).....	61
Tabel 5.3 In Which Channel (Melalui Saluran Apa)	67
Tabel 5.4 To Whom (Kepada Siapa)	74
Tabel 5.5 With What Effect (Dengan Efek Apa)	80
Tabel 5.6 Faktor Pendukung	84
Tabel 5.7 Faktor Penghambat.....	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
Gambar 1.1 Model Komunikasi Harold Laswell.....	21
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Demokrasi, yang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar*". Demokrasi mewakili suatu sistem pemerintahan di mana rakyat secara bersama-sama mengambil peran dalam mengelola negara melalui perantara wakil-wakilnya atau Pemerintahan Rakyat. Lebih dari sekadar struktur pemerintahan, demokrasi juga menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, memberikan ruang bagi ekspresi pendapat, dan memberikan kesempatan untuk mengartikulasikan aspirasi kolektif. Dengan kata lain, demokrasi memegang prinsip dasar pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat.

Salah satu aspek dari demokrasi yang bisa kita alami adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu mekanisme krusial dalam sistem demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara untuk menentukan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan publik. Pemilu menjadi pondasi yang kokoh dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan peluang kepada warga untuk terlibat secara langsung dalam proses politik. Pemilu diadakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah, dan para wakil rakyat terpilih ini membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 161 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk merespons, mengumpulkan, menyimpan, dan mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 81 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) memberikan ketentuan khusus, di mana anggota DPRD Provinsi diharuskan secara berkala melakukan kunjungan kerja untuk meresapi dan merespons aspirasi masyarakat. Mereka juga diwajibkan untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada warga di wilayah pemilihannya.

Dalam menjalankan tugasnya, wakil rakyat perlu memahami keinginan konstituennya, dan terdapat berbagai cara untuk mengetahui aspirasi masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan mereka. Salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dan warga adalah melalui kegiatan reses DPRD. Anggota DPRD menggunakan masa reses, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengunjungi daerah pemilihannya dan mendengar aspirasi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan selama delapan hari kerja dalam satu periode reses, yang diadakan tiga kali setahun. Reses dianggap sebagai tanggung jawab bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD demi mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, reses juga memiliki tujuan untuk memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah (Dilla, et al., 2017).

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan peran anggota DPRD Provinsi Lampung adalah kemampuan menjalankan komunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, kegiatan reses bukan sekadar kegiatan rutin,

melainkan sebuah platform penting di mana anggota DPRD dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok masyarakat di tingkat lokal, anggota DPRD perlu merangkul pendekatan komunikasi yang beragam. Ini melibatkan tidak hanya pertemuan langsung tatap muka, tetapi juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat.

Pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya mencakup pemahaman secara teoretis, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif dalam mengidentifikasi akar masalah di lapangan. Dengan memastikan keterlibatan langsung, anggota DPRD dapat menggali dinamika setiap kelompok masyarakat, memperoleh pemahaman kontekstual, dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kunci keberhasilan komunikasi ini terletak pada kemampuan anggota DPRD untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan transparan. Dengan memfasilitasi diskusi, anggota DPRD dapat memastikan bahwa suara setiap kelompok didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan mengadopsi peran komunikatif, anggota DPRD Provinsi Lampung dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga membentuk dasar bagi pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel.

Penulis melakukan observasi pada Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Terdapat beberapa kasus terkait bidang kesejahteraan, bidang pendidikan, bidang pembangunan, maupun bidang kesehatan. Penulis melakukan pengamatan di masyarakat Kelurahan Kelapa Tiga Permai yang dimana masyarakat mengeluh karena terdapat anggota DPRD Provinsi Lampung kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka, tak hanya itu terdapat permohonan mengenai pembangunan lapangan terbuka hijau serta

penurunan iuran BPJS. Di Kelurahan Panjang Utara mengharapkan adanya penanganan terkait banjir yang sudah meresahkan warga, dikarenakan sekecil apapun hujan, banjir pasti akan melanda. Faktor menurunnya ekonomi juga sangat dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Talang, lebih lagi dikarenakan dampak dari covid pada saat itu, sehingga warga mengharapkan adanya bantuan biaya modal usaha untuk warga yang kurang mampu berwirausaha.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung, menciptakan situasi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu terdapat peran penting anggota DPRD Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab secara aktif terlibat dalam mengumpulkan data, dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini menjadi kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk memastikan bahwa permasalahan-permasalahan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang efektif melalui kerja sama yang erat dengan pihak terkait yang dapat membantu memenuhi aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang tersebut sesuai dengan fungsi anggota DPRD, yaitu sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Penting bagi para pemimpin untuk merespons dan menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi tindakan konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Jika permasalahan dibiarkan tanpa penyelesaian, akan terbentuk pandangan bahwa para wakil rakyat tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang peran anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap kegiatan reses di Dapil 1 Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan penelitian dengan judul **“Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses (Studi kasus di Dapil 1 Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses?
2. Apa saja faktor pendukung anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses?
3. Apa saja faktor penghambat anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung khususnya pada Dapil 1 Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis dari penyelenggaraan penelitian terkait dengan kontribusi khusus dalam perkembangan teori, ilmu pengetahuan, dan lingkup akademis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperluas wawasan pengetahuan di dalam lingkup akademis.
- b. Merancang dan mengembangkan teori di ranah akademis, serta pemahaman dalam Sosiologi Politik, yang mencakup hubungan kompleks antara politik dan masyarakat dalam konteks sosial yang lebih luas.

- c. Menambah wawasan bagi masyarakat umum, khususnya bagi para peneliti, terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- d. Diharapkan bahwa peneliti dapat memberikan kontribusi pemikiran yang mendukung pengembangan kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan berkomunitas, berbangsa, dan bernegara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atau pragmatis terkait dengan kontribusi konkret yang diberikan oleh pelaksanaan penelitian terhadap objek penelitian, baik itu individu, masyarakat, maupun organisasi. Berikut adalah beberapa dampak dari hasil penelitian ini:

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan yang berguna bagi pembaca atau mahasiswa, khususnya bagi Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Informasi yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembaca dan menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi, dan masukan pertimbangan kepada DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan reses. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam pengambilan keputusan oleh instansi terkait.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dianggap sebagai sumber pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengapresiasi kegiatan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Secara etimologi, peran merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya, setiap tindakan individu memiliki makna penting bagi sebagian orang. Dalam perspektif ahli sosiologi, seperti yang dijelaskan oleh Raph Linton, peran dapat dianggap sebagai “*the dynamic aspect of status*”, di mana seseorang menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban yang terkait dengan suatu status. Status sendiri diartikan sebagai “*collection of right and duties*” (Linton, 1995). Menurut Merton Raho (2007:67), peran dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Konsep ini juga terkait dengan hubungan yang terbentuk berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu status sosial tertentu.

Menurut Soekanto (2007), peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang saat memainkan peran tersebut dengan mematuhi norma dan tanggung jawab yang melekat pada kedudukannya. Penting untuk membedakan antara peran yang dimiliki oleh seseorang dengan posisinya dalam pergaulan masyarakat. Peran berfokus pada fungsi, adaptasi, dan sebagai suatu proses. Terdapat tiga aspek dalam peran, yakni:

1. Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau peran seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran merupakan sekumpulan aturan yang memberikan panduan bagi seseorang dalam

2. menjalani kehidupan sosial.
3. Peran adalah ide yang menggambarkan kegiatan individu dalam kerangka sosial masyarakat sebagai suatu organisasi.
4. Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi dalam kerangka sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007:269).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk mencapai perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut.

2.1.2 Pembagian Peran

Bruce J. Cohen (1992:25) mengungkapkan bahwa peran atau role dapat dibagi menjadi beberapa aspek, di antaranya: Peran yang tampil nyata (*Acted Role*) adalah cara seorang individu benar-benar melaksanakan suatu peran.

1. Peran yang dianjurkan (*Prescribed Role*) mengacu pada norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang dalam menjalankan perannya.
2. Konflik peran (*Role Conflict*) terjadi saat seseorang memiliki beberapa status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan.
3. Kesenjangan peran (*Role Distance*) terjadi saat pelaksanaan peran melibatkan aspek emosional.
4. Kegagalan peran (*Role Failure*) merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan suatu peran tertentu.
5. Model peran (*role model*) adalah individu yang tindakan dan perilakunya dijadikan contoh, ditiru, dan diikuti oleh orang lain.
6. Rangkaian atau lingkup peran (*role set*) melibatkan hubungan seseorang dengan individu lainnya saat sedang menjalankan perannya.
7. Ketegangan peran (*role strain*) adalah kondisi di mana seseorang

menghadapi kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peran yang dijalankannya, karena adanya ketidakseragaman yang saling bertentangan.

2.1.3 Unsur-Unsur Peran

Beberapa peran melibatkan peran ideal, peran yang diakui oleh diri sendiri, dan peran yang dijalankan atau dikerjakan. Peran ideal mencakup harapan masyarakat terhadap status tertentu dengan menetapkan hak dan kewajiban bagi individu yang mengemban status tersebut. Sementara peran yang diakui oleh diri sendiri adalah tindakan yang dianggap wajar oleh individu dalam situasi tertentu. Peran yang dijalankan atau dikerjakan adalah peran yang benar-benar dilakukan oleh individu secara nyata.

Berdasarkan pengertian peran yang telah disebutkan, terdapat dua macam harapan dalam peranan. Harapan pertama dari peran yaitu harapan dari masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh individu yang memegang peran. Sedangkan harapan yang kedua yaitu harapan dari individu yang memegang peran terhadap orang-orang yang terlibat dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban atau peranan yang dimiliki olehnya (David Berry, 1983).

2.1.4 Jenis Peran

Soejono Soekanto (1990) mengidentifikasi beberapa jenis peran yang terbagi, seperti berikut:

1. Peranan dasar (*role basic*) merujuk pada peran yang memiliki signifikansi tetap dalam setiap konteks sosial atau fisik, tidak dapat diubah.
2. Peranan umum (*role generalized*) mencakup situasi yang sangat luas dan bersifat umum.
3. Peranan yang menjiwai (*role internalized*) yaitu adalah peran yang meresap dalam diri seseorang.

2.1.5 Dimensi Peran

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan
Peran dianggap sebagai suatu kebijakan yang tepat dan efektif untuk dijalankan;
2. Peran sebagai strategi
Peran diartikan sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat umum (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi
Peran digunakan sebagai sarana untuk memperoleh masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa pemerintahan berfungsi untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan masyarakat dianggap sebagai kontribusi berharga untuk membuat keputusan yang responsif dan bertanggung jawab;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa
Peran dipandang sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik dari beragam pendapat yang ada. Sudut pandang ini menekankan bahwa pertukaran ide dan pandangan dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi serta mengurangi ketidakpercayaan dan kebingungan;
5. Peran sebagai terapi
Peran dijalankan sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah psikologis dalam masyarakat, seperti perasaan ketidakberdayaan, kurang percaya diri, dan pandangan bahwa mereka bukan bagian yang penting dalam masyarakat. (Horoeputri, Arimbi, Achmad Susantosa, 2013).

2.2 Tinjauan Tentang Reses

2.2.1 Pengertian Reses

Reses adalah masa dimana anggota dewan melaksanakan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD secara individu untuk mengunjungi wilayah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses DPRD bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Reses DPRD memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi terlibat, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, dan proses pengambilan keputusan di DPRD.

Zuhri (2012: 3) mengartikan reses sebagai saluran komunikasi dua arah antara anggota legislatif dan konstituennya melalui kunjungan kerja berkala. Ini menjadi tanggung jawab anggota DPRD untuk secara rutin bertemu dengan konstituennya selama masa reses. Masa reses menurut PP No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD adalah periode kegiatan DPRD di luar sesi sidang dan di luar gedung. Penjadwalan masa reses mengikuti jadwal persidangan, diadakan sebanyak 3 kali dalam setahun atau total 14 kali dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

2.2.2 Tujuan Reses

Menurut petunjuk teknis/panduan pelaksanaan kegiatan reses DPRD Provinsi Lampung, reses diadakan dengan tujuan:

- a. Menyerap dan menanggapi harapan-harapan dari konstituen serta keluhan Masyarakat;
- b. Agar mendapat umpan balik antara masyarakat/pemangku kepentingan dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai bahan masukan pembuatan

- peraturan atau kebijakan tindaklanjut;
- c. Bertanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen Daerah Pemilihan sebagai perwakilan nyata dari rakyat dan pemerintahan;
- d. Mengawal program pemerintah di Daerah Pemilihan dan mendorong rakyat dan pemerintahan;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui aspirasi masyarakat.

Menurut Kariem dan rekan-rekan (2022), reses bertujuan untuk melakukan kunjungan ke wilayah pemilihannya setelah Pemilu Legislatif dengan maksud melaksanakan tanggung jawab dan fungsi sebagai anggota DPRD. Selain itu, reses juga diarahkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek, seperti pembangunan, pemerintahan, sosial ekonomi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

2.2.3 Tahapan dan Pelaksanaan Reses

Menurut Zuhri (2012:5) terdapat 4 tahapan reses, yaitu:

1. Rapat Pimpinan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses;
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Pelaksanaan reses;
4. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Dalam studi yang dilakukan oleh Wenas, dkk. (2021), disebutkan bahwa langkah-langkah reses melibatkan beberapa tahap, antara lain:

1. Sosialisasi kegiatan
 - a. Menentukan jadwal reses, yang mencakup keputusan anggota DPRD terkait waktu pelaksanaan reses untuk menampung aspirasi masyarakat;
 - b. Persiapan materi reses melibatkan kesiapan dalam menyampaikan

- materi untuk menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Persiapan sumber daya organisasi melibatkan partisipasi beberapa organisasi dalam kegiatan riset.
2. Pelaksanaan reses
- a. Program kerja DPRD disampaikan sebagai landasan bagi anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses selama satu periode;
 - b. Pemilihan metode pelaksanaan reses merujuk pada pemilihan cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai kegiatan reses;
 - c. Tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan reses;
 - d. Penetapan prioritas usulan melibatkan pemilihan atau pengambilan usulan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan reses oleh DPRD terdiri dari empat tahap, yang melibatkan masa persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil reses. Pada tahap persiapan, DPRD perlu mencapai kesepakatan mengenai jadwal, lokasi, kelompok sasaran, alokasi anggaran, serta data dasar yang menjadi fokus reses. Menurut Warsistiono (2009), pelaksanaan reses DPRD dapat dibagi menjadi lima aspek yang mencakup:

1. Waktu, kegiatan reses perlu disesuaikan dengan agenda masyarakat yang bersangkutan.
2. Tempat, harus dipilih secara strategis, menghindari timbulnya ketidakpuasan di antara konstituennya, dengan mempertimbangkan kondisi kelompok sasaran, ketersediaan anggaran, dan tujuan reses itu sendiri.
3. Pemilihan kelompok sasaran, sebaiknya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh kelompok tersebut.
4. Dukungan anggaran, harus mencakup kebutuhan seperti biaya administrasi, perlengkapan, konsumsi, dan akomodasi.
5. Data dasar yang mendukung kegiatan reses anggota DPRD seharusnya mencakup informasi mengenai kondisi geografis, demografis, sosial

ekonomi, dan prasarana.

2.3 Tinjauan Tentang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

2.3.1 Pengertian DPRD

Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berperan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD merupakan bentuk parlemen daerah di Indonesia, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah, dan diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) di Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) di Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) di Kota.

DPRD berperan sebagai mitra kerja bagi kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sejak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, kepala daerah tidak lagi memiliki tanggung jawab langsung kepada DPRD. Hal ini disebabkan karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.3.2 Fungsi DPRD

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Tertib, terdapat penjelasan mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

1. Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi legislasi melibatkan proses penyusunan

Propempera bersama Gubernur, bersama-sama membahasnya, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, tahapan pembentukan Peraturan Daerah mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan penyebarluasan. Kegiatan reses menjadi salah satu metode untuk melaksanakan fungsi ini, di mana para legislator dapat berdiskusi mengenai ide-ide legislatif yang mungkin diperlukan untuk mencerminkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum APBD, prioritas dan platform anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Anggota DPRD Provinsi Lampung juga dapat menggunakan kegiatan reses untuk mendiskusikan masalah anggaran dan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, mereka dapat berkontribusi dalam proses penetapan anggaran yang adil dan efektif.

3. Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Pengawasan tersebut melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan yang bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.3.3 Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Tertib, Tugas, dan Wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung:

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat pengawasan, reses memberikan peluang kepada anggota DPRD untuk melibatkan konstituen dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Selain itu, reses menjadi saat di mana anggota DPRD dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban Gubernur dalam pemerintahan daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebankan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, kegiatan reses tidak hanya berfungsi sebagai wadah dialog dengan masyarakat, tetapi juga sebagai tindakan konkret dalam menjalankan tugas legislasi dan pengawasan. Hal ini secara langsung terkait dengan sejumlah fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Hak yang dimiliki oleh DPRD

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak yakni:

1. Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah wewenang DPRD untuk meminta penjelasan dari Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan negara.;

2. Hak Angket

Hak angket adalah kekuasaan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang dianggap penting, strategis, dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mendapatkan klarifikasi dan informasi yang dibutuhkan;

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah kewenangan DPRD untuk memberikan pandangan atau pendapat terkait kebijakan Gubernur atau peristiwa yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi solusi yang diusulkan oleh DPRD;

2.4 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah dorongan kuat dan upaya yang dikerahkan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada kondisi saat ini. Menurut Hurlock (1979: 111), aspirasi dapat diklasifikasikan berdasarkan usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aspirasi individu dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk:

1. Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang

Aspirasi jangka pendek mencerminkan dorongan seseorang yang timbul dari pengalaman masa lalu, serta tekanan sosial yang membentuk arah aspirasinya. Sementara itu, harapan jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan pribadi, pengaruh budaya, dan keterkaitan antara keberhasilan dan kegagalan di masa lalu.

2. Aspirasi positif atau negatif

Aspirasi negatif menjadi fokus utama untuk menghindari kegagalan, sedangkan aspirasi positif difokuskan pada pencapaian kesuksesan. Seseorang yang memiliki aspirasi positif cenderung merasa puas dan menganggap dirinya sebagai individu yang berhasil, terutama dalam menjelaskan posisinya dalam masyarakat. Sebaliknya, aspirasi negatif menuntut untuk menghindari hal-hal yang dapat menurunkan status sosial.

3. Aspirasi realistis atau tidak realistis

Aspirasi yang dianggap realistis oleh seseorang dapat berubah menjadi tidak realistis seiring waktu, karena individu tersebut mungkin tidak memanfaatkan potensi penuhnya dalam mencapai tujuan. Meskipun memiliki motivasi yang kuat dan bekerja keras, aspirasi yang tidak realistis muncul ketika seseorang kurang memahami kemampuannya sendiri.

Jadi, aspirasi dapat diartikan sebagai harapan dan tujuan seseorang dalam mencapai target, baik itu dalam bentuk aspirasi jangka pendek maupun jangka

panjang. Aspirasi ini dapat dilihat dari orientasi individu terhadap kebutuhan, apakah itu bersifat positif atau negatif dalam mencapai kesuksesan, serta apakah aspirasi tersebut realistik atau tidak realistik, yang bergantung pada kesadaran individu akan kemampuannya.

2.5 Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Penyerapan aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilaksanakan dengan mendengarkan, menerima, memperhatikan, mempelajari, dan mengevaluasi aspirasi, baik yang sedang berkembang di masyarakat maupun yang disampaikan kepada DPR RI (Sari Dessi Permata, 2014). Proses penyerapan aspirasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua, sesuai dengan Dwiyanto dkk (2003), yaitu penyerapan oleh pemerintah dan penyerapan oleh DPRD. Penyerapan aspirasi oleh pemerintah dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan, sementara penyerapan oleh DPRD dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara umum, menurut Archon Fung yang dikutip oleh Salman (2009:25), terdapat tiga metode yang dikenal untuk memahami aspirasi masyarakat.

1. Lingkup partisipasi akan menentukan siapa yang berhak menyampaikan aspirasinya untuk memengaruhi kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan sejauh mana partisipasi aspirasi rakyat; pertama, self selected, memungkinkan masyarakat untuk secara bebas menyampaikan aspirasinya. Kedua, rekrutmen terseleksi, hanya individu yang memenuhi persyaratan yang berhak menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, random selection, mengacu pada penyerapan aspirasi masyarakat secara acak dengan memilih beberapa individu yang dianggap mewakili komunitas. Keempat, lay stakeholders, melibatkan beberapa warga negara yang secara sukarela bekerja tanpa bayaran. Kelima, professional stakeholders, melibatkan tenaga profesional yang digaji atau diberi honorarium dengan asumsi mereka memiliki kapasitas untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah masyarakat.

2. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.
3. Melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan semakin relevan produk kebijakan yang menghasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

Menurut Marwati (2007:52), terdapat beberapa jenis aspirasi, yakni:

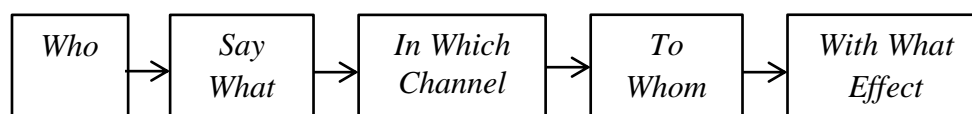
1. Aspirasi dalam bentuk tertulis, seperti catatan atau surat yang ditujukan kepada ketua DPRD, melibatkan:
 - a. Dukungan terhadap seseorang, mencakup aspirasi yang disampaikan kepada ketua DPRD terkait dukungan kepada individu tertentu karena prestasi yang telah diraihinya yang dapat berpengaruh pada pengambilan suara dalam pemilu.
 - b. Pernyataan, mencakup kesiapan individu atau kelompok untuk mendukung pejabat agar memperoleh kursi di dewan atau memimpin pemerintahan.
2. Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu disampaikan secara terbuka di depan ketua DPRD dan dewan lainnya. Jika jawaban diharapkan secara langsung maka anggota dewan secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran.
3. Aspirasi dalam bentuk perseorangan, dapat diungkapkan melalui sebuah tulisan yang ditujukan kepada ketua DPRD.
4. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi, aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Hal tersebut disebabkan ada rasa simpati atau antipati terhadap suatu badan pemerintahan dan simpati terhadap kelompok masyarakat. Unjuk rasa/demonstrasi diatur tersendiri dalam UU No. 9/1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum

5. Aspirasi kunjungan kerja, yang diungkapkan oleh masyarakat kepada anggota dewan saat anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke wilayah pemilihan mereka.

2.6 Landasan Teori

2.6.1 Teori Komunikasi Politik Harold Laswell

Memahami komunikasi politik pada prinsipnya adalah pengembangan dari komunikasi. Secara sederhana Harold Laswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*. Effendy (2005:10) mengemukakan bahwa komunikasi adalah *Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect* atau siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya.



Gambar 1.1 Model Komunikasi Harold Laswell (Effendy, 2005:10).

Who dapat diartikan sebagai pihak yang berperan sebagai komunikator, entah itu individu, kelompok, organisasi, atau bahkan suatu negara. *Say what* merupakan isi atau informasi yang akan disampaikan kepada penerima pesan (komunikan) dari sumber (komunikator). *In which channel* mencakup saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan, baik melalui tatap muka langsung maupun melalui media cetak/elektronik. *To whom* merujuk pada penerima pesan, yang bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau negara. *With what effect* menggambarkan dampak atau efek yang timbul pada komunikan setelah menerima pesan, seperti perubahan sikap, perilaku, atau peningkatan pengetahuan..

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan mengenai politik dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya, atau antar-sistem politik

dan sosial, disebut sebagai komunikasi politik. Menurut Surbakti (2010:152), Rush (2008:24) menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah penyaluran informasi politik yang relevan di antara bagian-bagian dalam sistem politik dan antara sistem politik dengan sistem-sistem sosial. Harun dan Sumarno (2006:3) mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik, menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi politik terdapat elemen-elemen inti yang mencakup komunikator politik, komunikan, isi komunikasi (pesan), media komunikasi, tujuan komunikasi, sumber, dan efek. Peran komunikator politik menjadi sangat signifikan. Nimmo (1978:16) menekankan bahwa komunikator politik memiliki peran sosial yang krusial dalam proses pembentukan opini publik. Dia mengelompokkan mereka berdasarkan peran sosial mereka dalam masyarakat menjadi tiga kategori, yaitu politikus yang berperan sebagai komunikator politik, komunikator profesional di bidang politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu.

Dengan teori komunikasi politik memungkinkan peneliti menjelaskan bagaimana proses komunikasi politik antara anggota DPRD dan masyarakat terjadi, bagaimana anggota DPRD memperoleh informasi tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, dan bagaimana informasi ini mempengaruhi pengambilan keputusan politik mereka. Teori Harold Lasswell menekankan pentingnya mengidentifikasi "siapa yang mengatakan apa kepada siapa melalui saluran apa dengan efek apa." Dalam konteks penelitian ini, peneliti menganalisis komunikasi antara anggota DPRD (siapa), pesan apa yang disampaikan (mengatakan apa), kepada masyarakat (kepada siapa), melalui kegiatan reses sebagai saluran komunikasi (saluran apa), dan dampak atau efeknya pada perwakilan dan pengambilan keputusan politik (efek apa).

Lasswell memaparkan bahwa model komunikasi politik yang dia rancang menunjukkan bahwa pihak yang berkomunikasi pasti memiliki niat untuk mempengaruhi penerima pesan. Dalam konteks ini, cara pesan disampaikan dalam komunikasi politik dapat menghasilkan efek baik atau buruk. Dampak dari komunikasi politik ini bervariasi tergantung pada metode penyampaian yang digunakan oleh pengirim pesan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	Ibnu Ubayd Dilla, M.Arif nasution, Agus Suradi (2020) yang mengkaji tentang “Efektivitas Program Reses Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Medan Labuhan”	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif melalui pendekatan deskriptif, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil responden dari masyarakat kota Medan Kecamatan Medan Labuhan masih terdapat faktor penghambanya yaitu mengenai ketersediaan fasilitas, keterbatasan anggaran, dan ketersediaan waktu. Tetapi masyarakat pun merasakan manfaat dari pelaksanaan reses dapat memberikan manfaat dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta

		lapangan pekerjaan dapil V Kota Medan.
2.	Rizky Abdul Malik (2019) “Komunikasi Politik (Studi Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019)”.	Jurnal ini membahas mengenai bagaimana bentuk komunikasi politik anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya terhadap konstituen di daerah pemilihannya, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan untuk mengkajinya adalah konsep partai politik, komunikasi politik dan masa reses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan komunikasi politik dalam kegiatan reses berjalan tidak efektif disebabkan karena anggota DPRD fraksi PPP Kota Tasikmalaya menjadikan reses sebagai agenda rutinitas dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat.
3.	Rizka Azzahri, Seno Andri, Adianto (2021) yang mengkaji tentang “Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat”.	Jurnal ini membahas tentang efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan untuk pengukuran efektivitas penggunaan dana ialah teori efektivitas menurut Makmur (2010). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru belum efektif. Koordinasi yang dilakukan antara anggota dewan dengan pihak kecamatan yang tidak saling terhubung dalam melaksanakan kegiatan reses.
4.	Jannus T.H, Siahaan dan Sunaryo Manurung (2020)	Fokus penelitian ini adalah tentang peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa dalam

	<p>“Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat”.</p>	<p>mengupayakan Aspirasi Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan mengenai bentuk-bentuk aspirasi masyarakat dalam masyarakat yaitu aspirasi dalam bentuk lisan, perorangan, unjuk rasa maupun kunjungan kerja. Dari hasil peneltian ini peran anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PKB dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah maksimal, tetapi terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala anggota DPRD SUMUT fraksi PKB dalam memperjuangkan aspirasi yaitu mengenai anggaran dari pemerintah daerah yang tidak cukup untuk merealisasikan semua aspirasi rakyat dalam pembangunan fisik.</p>
--	---	---

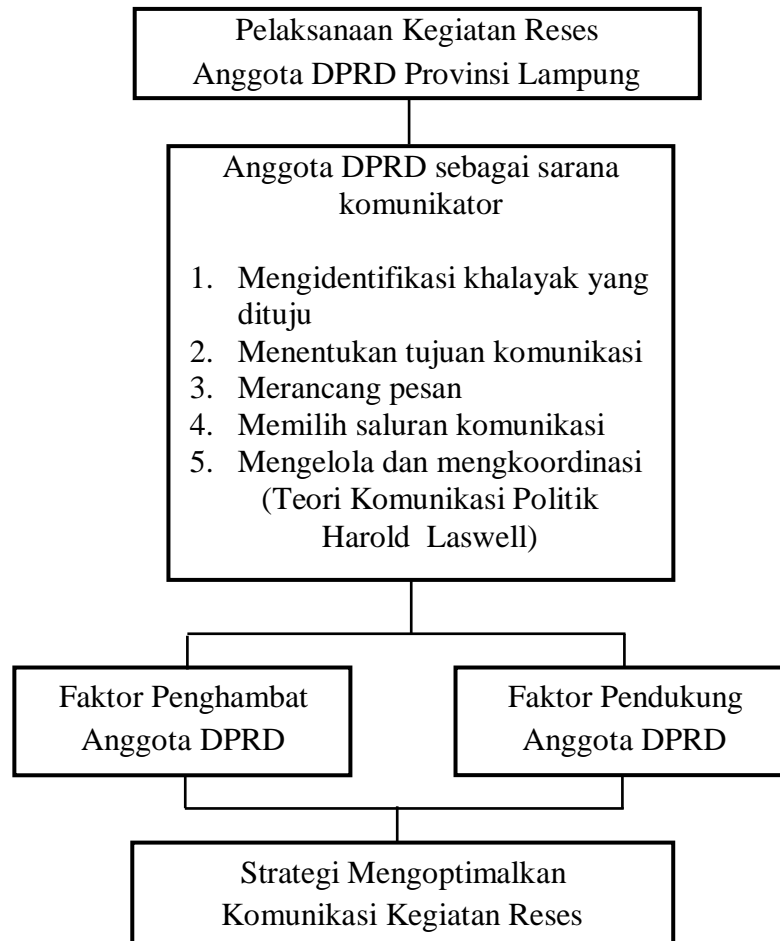
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan pada variabel aspirasi masyarakat yaitu sama-sama membahas mengenai penyerapan aspirasi masyarakat yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian persamaan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas mengenai Peran anggota DPRD dalam berkomunikasi dan faktor penghambat anggota DPRD dalam menyerap aspirasi, Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu beberapa penelitian hanya memfokuskan bagaimana komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat, dan hanya memfokuskan faktor penghambat dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan terkait peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan reses dapat memeriksa bagaimana komunikasi terjadi, apa yang dikomunikasikan, kepada siapa, melalui saluran apa, dan apa dampaknya terhadap pengambilan

keputusan, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan reses.

2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2007:60) Kerangka berfikir adalah hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori- teori yang telah dideskripsikan, di analisis secara kritis. Dapat ditegaskan bahwa peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional semata, melainkan juga mewakili inti dari fungsi representatif anggota DPRD. Anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi suara bagi warga di daerah pemilihannya. Teori komunikasi politik diimplementasikan untuk membahas peran anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai komunikator dalam menyerap aspirasi masyarakat. Teori ini dapat membantu memahami dinamika komunikasi antara anggota DPRD dan konstituennya, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis pengaruh pesan yang disampaikan, serta melihat dampaknya pada pemahaman dan penerimaan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, reses bukan hanya sebagai bentuk partisipasi formal, melainkan sebagai sarana yang memberikan legitimasi kepada anggota DPRD untuk mengemban tugas mereka sebagai wakil rakyat dengan lebih baik dan responsif terhadap kepentingan yang mereka wakili.

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam penelitiannya yaitu:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti. 2023

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan cara terstruktur, logis dan terencana, dengan tujuan menghimpun, memproses, menganalisis data, serta meraih informasi menggunakan metode atau teknik tertentu untuk menjawab permasalahan yang muncul. Menurut I Made Merta Jaya (2020:110) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penyelidikan menyeluruh terhadap suatu objek, di mana peneliti menjadi instrumen utama. Hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data yang valid. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, dan datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik.

Cresswell (2014:232) dalam Indrawati (2018:2) menuliskan bahwa *“qualitative methods rely on text and image data, have unique steps in data analysis, and draw on diverse design”* yang dapat diartikan secara bebas adalah bahwa penelitian kualitatif tergantung pada data teks atau gambar, metode ini memiliki langkah-langkah penganalisisan data yang unik, dan mengambil kesimpulan berdasarkan design yang berbeda.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) melibatkan beberapa aspek utama. Pertama penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah, langsung mengakses sumber data dan pebeliti berperan sebagai instrumen kunci. Kedua, penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, dengan data yang terkumpul

berupa kata-kata atau gambar, tanpa penekanan pada angka. Ketiga, penelitian ini menekankan proses daripada hasil atau produk akhir. Keempat, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Kelima, penelitian berfokus pada pengungkapan makna. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan, yaitu memahami secara menyeluruh pelaksanaan reses dan respon anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap aspirasi masyarakat.

3.2 Fokus Penelitian

1. Penelitian ini difokuskan untuk melihat peran anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai komunikator dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, mengacu pada model komunikasi politik Harold Laswell yang dapat dijelaskan sebagai berikut Effendy (2005:10):
 - a. *Who* (Siapa)

Dalam konteks ini, "*Who*" merujuk kepada anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai komunikator politik yang berperan dalam menyampaikan pesan politik dan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
 - b. *Says What* (Mengatakan apa)

Bagian ini akan menganalisis pesan yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung selama kegiatan reses, termasuk isu-isu yang mereka angkat dan cara mereka menyuarakan aspirasi masyarakat.
 - c. *In Which Channel* (Melalui saluran apa)

Ini mencakup pemilihan saluran komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyampaikan pesan politiknya selama kegiatan reses, seperti pidato, media sosial, surat kabar, atau pertemuan langsung dengan masyarakat.
 - d. *To Whom* (Kepada siapa)

Fokus pada audiens atau masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Lampung selama kegiatan reses.
 - e. *With What Effect* (Dengan efek apa)

Ini akan mengevaluasi efek atau dampak dari kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyampaikan pesan politik dan menyerap aspirasi masyarakat, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi hubungan antara anggota DPRD dan konstituennya.

Dengan menggunakan teori Harold Lasswell penelitian ini dapat membantu memahami dinamika komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas mereka untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

2. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

3.3 Lokasi Penelitian

Sugiyono (2012;13) menyatakan bahwa objek penelitian merujuk pada target ilmiah yang dijadikan sumber data dengan maksud dan kegunaan tertentu mengenai suatu hal yang bersifat objektif, dan valid. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena:

1. Adanya permasalahan mengenai pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung.
2. Lokasi yang dapat dijangkau oleh peneliti karena secara geografis berada di wilayah Kota Bandar Lampung.
3. Banyaknya sumber data penelitian yang mendukung.

3.4 Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel atau subjek penelitian. terutama orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa

tertentu dan sebagainya (Rahmadi, 2011). Dalam penelitian ini, penulis melibatkan 8 (delapan) orang narasumber yang memenuhi kriteria-kriteria khusus berdasarkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung
2. Konstituen Kegiatan Reses Dapil 1 Kota Bandar Lampung

3.5 Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Dalam perspektif Nasution (2001), sumber data primer ialah sumber yang memberikan informasi secara langsung dari sumber asal atau tangan pertama. Peneliti mengumpulkan informasi terkait peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menangkap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Data diperoleh melalui pendekatan observasi, wawancara tatap muka, dan pendekatan lainnya, yang nantinya akan diolah kembali. Penelitian ini melibatkan delapan narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian di DPRD Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Informasi tambahan yang berasal dari berbagai sumber tertulis disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data pendukung diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian (Nasution, 2003). Data sekunder adalah hasil pengumpulan informasi oleh peneliti dari laporan atau dokumen yang bersifat tertulis. Laporan tertulis ini didasarkan pada data yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen yang mendukung informasi yang diperlukan oleh penulis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dari suatu penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan

penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang ditentukan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Sukmadinata (2010) mengemukakan bahwa observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung untuk memahami aspirasi masyarakat.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merujuk pada suatu bentuk teknik komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan, sementara pihak lainnya berperan sebagai responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Handari, 2020). Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara mendalam dengan informan yang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 dan konstituen reses di Kota Bandar Lampung. Untuk mendukung proses wawancara, digunakan alat bantu seperti tape recorder dan catatan-catatan kecil guna membantu peneliti dalam menggali informasi dari para informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang sangat erat hubungannya dengan Peran Anggota DPRD dalam kegiatan Reses. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang rinci dan konkret mengenai pelaksanaan reses di dapil 1 Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009;89), analisis data merupakan suatu proses sistematis untuk mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, pembentukan pola, pemilihan aspek yang penting dan layak dipelajari, serta pembuatan kesimpulan agar mudah dimengerti oleh peneliti sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2009;91) menggunakan teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta pembuatan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data didefinisikan sebagai proses merangkum, memusatkan fokus pada informasi yang disederhanakan dari hasil wawancara atau penelitian (Patilima, 2004), demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti dalam pengumpulan dan pencarian informasi dibutuhkan (Sugiyono, 2015).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Melalui penyajian data akan memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dan kemudian merencanakan tindakan lanjut berdasarkan pemahaman. Penyajian data peneliti akan berbentuk deskriptif dengan hubungan antar kategori yang sedang dibahas dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Menurut Sugiyono (2015) dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peeneliti berada di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini diungkapkan dalam pernyataan singkat dan mudah dimengerti, mencerminkan bagaimana anggota DPRD Provinsi Lampung berperan dalam menerima aspirasi masyarakat melalui

kegiatan reses.

3.8 Keabsahan Data

Mengevaluasi hasil penelitian dapat dilakukan melalui metode triangulasi, yang merupakan pendekatan penting dan sederhana. Ini melibatkan penggabungan sumber data, metode, dan waktu untuk memastikan keabsahan temuan.

1. Triangulasi Sumber Data

Penelitian dilaksanakan dengan mewawancarai berbagai informan menggunakan pertanyaan yang serupa. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesamaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, memastikan konsistensi antara jawaban informan satu dengan informan lainnya.

2. Triangulasi Metode

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil observasi dikaitkan dengan temuan dari wawancara, menciptakan suatu bentuk konvergensi antara metode-metode yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Peneliti melakukan wawancara dengan informan pada berbagai waktu, seperti hari yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi jawaban informan dari waktu ke waktu, sehingga hasil dapat diandalkan. Misalnya, pertanyaan yang sama diajukan pada waktu dan situasi yang berbeda untuk mengevaluasi kesesuaian jawaban informan antara wawancara pertama dan wawancara berikutnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

4.1.1 Sejarah Kota Bandar Lampung

1. Zaman Pasca Kemerdekaan Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung mengalami perubahan nama menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (diterbitkan dalam Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Setelah itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia, perubahan tersebut diresmikan melalui Keputusan Walikota Bandar Lampung No 17 tahun 1999. Seiring dengan keputusan tersebut, terjadi perubahan dalam penyebutan nama entitas pemerintah, di mana Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung beralih menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan penamaan ini masih berlaku hingga saat ini.

2. Hari Jadi Kota Bandar Lampung

Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan laporan Residen Banten, William Craft, kepada Gubernur Jenderal Cornelis. Laporan tersebut merujuk pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang diteruskan kepadanya pada tanggal 17 Juni 1682. Isi laporan mencakup informasi tentang Lampong Telokbetong di tepi laut sebagai tempat kedudukan Dipati

Temenggung Nata Negara, yang mengendalikan 3.000 orang dan hasil simposium. Pada tanggal 18 November 1982, serta melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983, ditetapkan bahwa hari jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung adalah tanggal 17 Juni 1682.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

A. Visi

Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat.

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang naik, bersih berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

4.1.3 Geografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung, dengan wilayah seluas 197,22 km², terbagi

menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Menurut sensus 2021, jumlah penduduknya mencapai 1.184.949 jiwa. Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak di kisaran lintang selatan 5°20' hingga 5°30' dan bujur timur 105°28' hingga 105°37', berada di Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Dengan lokasi strategis ini, Kota Bandar Lampung berperan sebagai pintu gerbang utama menuju Pulau Sumatera, terletak sekitar 165 km sebelah barat laut Jakarta.

1.1.4 Kependudukan Kota Bandar Lampung

Berikut adalah data persebaran penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan wilayah Kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2022:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Teluk Betung Barat	21.995	20.647	42.642
Teluk Betung Timur	28.863	27.038	55.901
Teluk Betung Selatan	22.660	21.823	44.483
Bumi Waras	33.812	31.730	65.542
Panjang	42.755	41.096	83.851
Tanjung Karang Timur	22.743	21.954	44.697
Kedamaian	30.504	29.580	60.084
Teluk Betung Utara	28.248	27.319	55.567
Tanjung Karang Pusat	29.570	28.459	58.029
Enggal	14.939	14.788	29.727
Tanjung Karang Barat	34.679	33.341	68.020
Kemiling	46.701	45.206	91.907
Langkapura	23.011	22.197	45.208
Kedaton	30.081	29.412	59.493
Rajabasa	30.566	29.190	59.756
Tanjung Senang	32.600	31.907	64.507
Labuhan Ratu	27.374	26.990	54.364
Sukarame	35.592	34.681	70.273
Sukabumi	40.232	38.492	78.724
Way halim	38.946	38.216	77.162
Kota Bandar Lampung	615.871	594.066	1.209.937

Sumber: Diolah oleh peneliti dari BPS, 2023.

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 adalah sebesar 1.209.937 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Panjang sebesar 42.755 jiwa dan jumlah penduduk perempuan terbanyak berada di Kecamatan Kemiling sebesar 45.206 jiwa.

1.1.5 Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (jiwa) di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan yang Dimatkan (Jiwa)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan (Jiwa)								
	Bekerja			Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<= SD	101674	99874	105094	4232	7232	12286	105906	107106	117380
Sekolah Menengah Pertama	76800	82806	75911	4928	6404	7004	81728	89210	81915
Sekolah Menengah Atas	198077	219878	232669	17491	267671	22676	215568	246639	255345
Perguruan Tinggi	98693	102925	96837	9791	8344	7630	108484	111269	104467

Sumber: Diolah oleh peneliti dari BPS, 2023.

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa angkatan kerja di Kota Bandar Lampung berdasarkan pendidikan yang ditamatkan sudah banyak yang bekerja dan mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun angka pengangguran cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja tertinggi pada tahun 2021 yaitu pada tamatan pendidikan SMA disusul dengan tamatan SD, Perguruan Tinggi dan tamatan SMP.

1.1.6 Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung

Struktur perekonomian Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Distribusi Presentase PDRB (Persen) Kota Bandar Lampung:

Tabel 4.3 Distribusi Presentase PDRB (Persen), 2021-2022

PDRB Sektor	Distribusi Presentase PDRB (Persen)	
	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,36	27,90
B. Pertambangan dan Penggalian	5,60	5,89
C. Industri Pengolahan	19,70	18,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,11	0,10
F. Konstruksi	9,90	9,75
G. Perdagangan Besar dan Eceran	11,70	13,20
H. Transportasi dan Pergudangan	4,95	5,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,52
J. Informasi dan Komunikasi	4,28	3,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,22	2,08
L. Real Estate	2,88	2,75
M,N. Jasa Perusahaan	0,15	0,16
O. Administrasi Pemerintahan	3,57	3,24
P. Jasa Pendidikan	3,04	2,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,85	1,00
PDRB	100,00	100,00

Sumber: Diolah oleh peneliti dari BPS, 2023.

Dari data tahun 2021-2022, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Bandar Lampung yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,36 % di tahun 2021 dan di tahun 2022 sebesar 27,90%.

4.2 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

4.2.1 Profil DPRD Provinsi Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan badan perwakilan rakyat di tingkat provinsi Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait otonomi daerah Provinsi Lampung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap lima tahun sekali, anggota DPRD Provinsi Lampung dipilih melalui pemilihan umum. Pada periode 2019-2024, terdapat 84 anggota DPRD Provinsi Lampung yang terpilih dan tergabung dalam 8 Fraksi, seperti Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Peran penting fraksi-fraksi ini adalah menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat Lampung.

Tabel 4.4 Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bandar Lampung

No	Daerah Pemilihan	Nama	Partai
1.	Dapil I Bandar Lampung	Hi. Fauzan Sibron, SE.,Akt	Nasdem
2.		Aprilliati, SH.,MH	PDI-P
3.		Drs. Azwar Yacub	Golkar
4.		Kostiana, SE.,MH	PDI-P
5.		H. Yusirwan, SE., MH	PAN
6.		Ar Suparno, SE	PDI-P
7.		Hi. Budiman AS	Demokrat
8.		R Mirzani Djausal, ST.,MM	Gerindra
9.		H. Ade Utami Ibnu, SE	PKS
10.		H. Syarif Hidayat, ST.,MM	PKS
11.		Lenistan Nainggolan, SH	PDI-P
12.	Dapil II Lampung Selatan	H. Raden Muhammad Ismail,S.T	Demokrat
13.		H. Puji Sartono, A.Md	PKS
14.		I Gede Jelantik, SE	Golkar
15.		Sahlan Syukur, SE	PDI-P
16.		Lesty Putri Utami, SH.M.Kn	PDI-P
17.		Nurul Ikhwan	PDI-P

18.		Fahrorrozi, ST	Gerindra	
19.		Hi. Okta Rijaya M.MM	PKB	
20.		Wahrul Fauzi M.MM	Nasdem	
21.	Dapil III Pesawaran, Pringsewu, Metro	Elly Wahyuni, SE.MM	Gerindra	
22.		Hj. Ririn Kuswantari S.Sos	Golkar	
23.		Drs. Fx Siman	Golkar	
24.		H. Zunianto. M.Pd.I	PKS	
25.		Hi. Watoni Noerdin, Sh.MH	PDI-P	
26.		Siti Rahma, SE	Nasdem	
27.		Hanifah, SE	PKB	
28.		Angga Satriapratama, S.I.Kom	Demokrat	
29.		Supriyanto. SP.MM	PPP	
30.		Hj. Nurhasanah, SH.MH	PDI-P	
31.		A Iswan H Caya, SH.MH	PAN	
32.		Dapil IV Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat	Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si	Gerindra
33.			Hi. Dadang Sumpena, S.Sos	PDI_P
34.	Nuril Anwar, S.Sos		Nasdem	
35.	H. Yanuar Irawan, SE.MM		PDI-P	
36.	H. Mirzalie SS,SH.MM		Gerindra	
37.	H. Azuanzyah, S.Ag		PKB	
38.	H. Supriyadi Hamzah, SH		Golkar	
39.	H. Amaluddin, SH		Demokrat	
40.	H. Heni Susilo, S.Pd		PKS	
41.	Joko Santoso, SP.MM		PAN	
42.	Dapil V Way Kanan, Lampung Utara	Hi. Mardani Umar, SH., MH	PKS	
43.		Deni Ribowo, SE	Demokrat	
44.		Hi. Pattimura, SE	Gerindra	
45.		Drs. Yose Rizal., MH	PDI-P	
46.		Yozi Rizal, SH	Demokrat	
47.		Hi. Imam Syuhada	Nasdem	
48.		Soni Setiawan, ST., MH	PKB	
49.		Darlan Pone, SH., MM	Golkar	
50.		Drs. Darwin Hifni	PAN	
51.		Mardiana, ST., MT	Nasdem	
52.		Sahdana, S.Pd	PDI-P	
53.		H. Ismet Roni, SH.MH	Golkar	
54.		Veri Agusli, HTB, SE	Gerindra	
55.	Dapil VI	H. Semin, S.Pd.I	PKS	
56.		Ketut remeo	PDI-P	

57.	Mesuji, Tulang	Maulidah Zauharoh, MA.Pd	PKB
58.	Bawang, Tulang	Hanifal. SP	Demokrat
59.	Bawang Barat.	Drs. Mikdar Ilyas, MM	Gerindra
60.		Budhi Condrowati, SE	PDI-P
61.		Budi Yohanda, Sh.M.Kn	Nasdem
62.		H.Suprpto, S.Psi.MH	PAN
63.	Dapil VII Lampung Tengah	Mingrum Gumay, SH	PDI-P
64.		Drs. I Made Bagiasa	Golkar
65.		Dr. Hj. Asih Fatwanita, MM	Nasdem
66.		Ferdy Ferdian Azis, SH. MA	Golkar
67.		I Made Suarjaya, SH.MA	Gerindra
68.		Dra. Jauharoh Hadad, MM	PKB
69.		Ikhwan Fadil Ibrahim, SH	Gerindra
70.		Maksum Asrori	PKB
71.		Vittorio Dwison, S.IP	PKS
72.		Ir. Hi. Midi Iswanto. MH	Demokrat
73.		Ni Ketut Dewi Nadi, ST	PDI-P
74.		Abdullah Sura Jaya, SH	PAN
75.	Dapil VIII Lampung Timur	Hi. Noverisman Subing. SH	PKB
76.		H. Ismail Jafar, Lc	PKS
77.		H. Garinca Reza P,S.I.Kom	Nasdem
78.		Binti Amanah	PKB
79.		Ketut Erawan, SH	PDI-P
80.		Muhammad Khadafi Azwar, SH	Demokrat
81.		Ferliska Ramadhita Johan, SH	PDI-P
82.		Asep Makmur	Demokrat
83.		Ahmad Giri Akbar, SE.MBA	Gerindra
84.		H. Ali Imron, S.Fil	Golkar

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung,2023

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terbagi menjadi 8 daerah pemilihan dengan wilayah yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung dengan anggota dewan yang tertera pada tabel diatas.

4.3 Profil Informan

Informan penelitian merujuk kepada seseorang yang diakui memiliki pemahaman terkait masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informan yang dipilih adalah anggota dewan yang tanggap terhadap isu-isu masyarakat di daerah pemilihannya dan juga masyarakat yang aktif khusus di daerah pemilihannya sehingga dapat memberikan tanggapan informatif terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti. Penelitian ini melibatkan 8 (delapan) informan, dengan profil masing-masing informan dijelaskan sebagai berikut:

Informan 1

Informan pertama pada penelitian ini adalah Ibu A yang berjenis kelamin perempuan berusia 57 tahun. Ibu A adalah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI-P yang telah aktif dalam dunia politik selama 2 periode. Dalam komisi beliau menjabat sebagai Komisi 1 tahun 2014-2019 terkait Badan Pembentukan Daerah dan Komisi V tahun 2019-2024 terkait Kesejahteraan Masyarakat. Dalam daerah pemilihan beliau menjabat sebagai Sekretaris di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.

Informan 2

Informan kedua pada penelitian ini adalah Bapak BAS yang berjenis kelamin laki-laki berusia 63 tahun. BAS merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Fraksi Demokrat dan menjabat selama 1 periode tahun 2019-2024. Dalam komisi beliau menjabat sebagai anggota Komisi I yaitu bidang Pemerintahan, Hukum dan Perizinan, dalam daerah pemilihan beliau menjabat sebagai anggota di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini Budiman AS merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung.

Informan 3

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak ARS, yang berjenis kelamin laki-laki berusia 63 tahun. ARS adalah seorang anggota DPRD Provinsi

Lampung dari Fraksi PDI-P yang telah aktif dalam dunia politik selama 1 periode tahun 2019-2024. Dalam komisi beliau menjabat sebagai anggota Komisi 5 yaitu bidang Kesejahteraan Masyarakat, dalam daerah pemilihan beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.

Informan 4

Informan keempat pada penelitian ini adalah Bapak SH yang berjenis kelamin laki-laki berusia 53 tahun. Bapak SH adalah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS yang telah aktif dalam dunia politik selama 1 periode tahun 2019-2024. Dalam komisi beliau menjabat sebagai anggota Komisi V yaitu Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Dalam daerah pemilihan, beliau menjabat sebagai anggota di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.

Informan 5

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak AUI yang berjenis kelamin laki-laki berusia 48 tahun. Bapak AUI adalah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS yang telah aktif dalam dunia politik selama 2 periode. Dalam komisi beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi 4 bidang Pembangunan. Dalam daerah pemilihan beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.

Informan 6

Informan keenam pada penelitian ini adalah Ibu ER yang berjenis kelamin perempuan berusia 48 tahun. Ibu ER bekerja sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, beliau adalah salah satu anggota PKK di daerahnya. Pada penelitian ini Ibu ER merupakan masyarakat di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.

Informan 7

Informan ketujuh pada penelitian ini adalah Mas MFA yang berjenis kelamin laki-laki berusia 26 tahun. MFA bekerja sebagai staf operasional di salah satu

rumah makan. Selain itu, beliau adalah salah satu tokoh pemuda di lingkungan rumahnya. Pada penelitian ini MFA merupakan konstituen reses di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.

Informan 8

Informan kedelapan pada penelitian ini adalah Ibu N yang berjenis kelamin perempuan berusia 38 tahun. Ibu N bekerja sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, beliau adalah salah satu konstituen dari kegiatan reses. Pada penelitian ini Ibu N merupakan masyarakat di daerah pemilihan 1 Kota Bandar Lampung.

Tabel 4.5 Profil Informan

No	Nama	Partai	Jabatan	Periode
1.	A	PDI-P	- Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 1 - Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 5 - Sekretaris Daerah Pemilihan 1	- 1 periode (2014-2019) - 1 periode (2019-2024) - 1 periode (2019-2024)
2.	BAS	Demokrat	- Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 - Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung	- 1 periode (2019-2024) - 1 periode (2019-2024)
3.	ARS	PDI-P	- Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 - Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung	- 1 periode (2019-2024) - 1 periode (2019-2024)
4.	SH	PKS	- Anggota DPRD	- 1 periode

			Provinsi Lampung Dapil 1 - Anggota Komisi 5 Provinsi Lampung	(2019-2024) - 1 periode (2019-2024)
5.	AUI	PKS	- Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 - Sekretaris Komisi 4 Provinsi Lampung	- 2 periode (2014-2019), (2019-2024). - 1 periode (2019-2024)
6.	ER	-	Anggota PKK	-
7.	MFA	-	Tokoh Pemuda	-
8.	N	-	Konstituen Reses	-

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

Berdasarkan data tabel informan, peneliti memiliki 5 informan anggota DPRD Provinsi Lampung yang sudah memberikan variasi representatif dalam hal pengalaman, pandangan politik, lama pengabdian, atau peran spesifik dalam komisi atau fraksi tertentu. Ini membantu menggambarkan keragaman peran dan respons anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap kegiatan reses. Selanjutnya untuk informan masyarakat, peneliti memilih 3 informan yang terdiri dari anggota PKK, tokoh pemuda, dan konstituen reses. Para informan masyarakat tersebut merupakan tokoh masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung atau yang merasakan manfaatnya di Dapil 1 Kota Bandar Lampung.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Peran anggota DPRD mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai perpanjangan suara masyarakat, tidak hanya mengesahkan undang-undang atau mengawasi pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Melalui kegiatan reses, anggota DPRD Provinsi Lampung menjalankan fungsi komunikasi politik dengan menciptakan saluran langsung untuk berinteraksi dengan konstituennya. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah (saluran), tetapi juga sebagai pemegang peran yang menyerap aspirasi, dan menyampaikan informasi.

Dengan aktif menampung, menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi, dan menjadi tempat diskusi langsung, anggota DPRD Provinsi Lampung secara langsung mengimplementasikan konsep Lasswell dalam konteks kegiatan reses. Dampaknya adalah memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat tentang peran legislatif terhadap kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, bahwa pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung terbukti cukup berhasil. Upaya yang dilakukan mencapai tingkat efektivitas yang memadai, dengan memberikan fokus pada

usaha semaksimal mungkin dan merujuk pada komunikasi politik. Keberhasilan ini dapat diperkuat oleh respon dari seluruh anggota DPRD, yang menyatakan bahwa pelaksanaan reses yang mereka lakukan telah terlaksana dengan baik. Kerjasama dengan beberapa tokoh masyarakat dalam pelaksanaan reses juga menjadi faktor pendukung, hal ini dapat memfasilitasi akses yang lebih mudah ke informasi, masukan, dan aspirasi masyarakat.

Namun, dilihat pula dari respons beberapa warga yang menyatakan bahwa masih terdapat wilayah yang tidak tersentuh oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dan pelaksanaan reses belum berjalan optimal karena beberapa usulan dari masyarakat masih belum terwujud. Teori Lasswell menyoroti bahwa waktu yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan dengan efektif, dan hal ini terlihat dalam konteks keterbatasan waktu anggota DPRD untuk mencakup semua desa. Penyebab dari belum terlaksananya usulan-usulan masyarakat ini dikaitkan dengan keterbatasan anggaran atau dana yang diberikan kepada anggota DPRD. Dana yang dialokasikan untuk anggota dewan tidak mencukupi untuk mengakomodasi semua masukan dan usulan dari konstituen. Oleh karena itu, para anggota dewan perlu melakukan pembahasan mendalam terkait hal ini, serta lebih mengutamakan prioritas apa yang menjadi aspek krusial dalam menentukan hasil dari penjangkaran aspirasi yang nantinya akan menjadi pandangan umum komisi pada sidang paripurna.

Dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat, terdapat faktor pendukung yang signifikan dari segi internal, antara lain komunikasi yang efektif dan alokasi anggaran untuk kegiatan reses. Dari segi eksternal, partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan peran dan hasil kegiatan reses, perlu diberikan perhatian khusus terhadap penanganan kendala-kendala tersebut, sambil terus memperkuat dan memanfaatkan faktor pendukung yang telah teridentifikasi. Penting untuk diakui bahwa peran anggota DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan reses

tidak hanya tergantung pada upaya individu, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang dan hambatan yang ada.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa faktor penghambat dalam segi internal melibatkan keterbatasan anggaran dan waktu dalam menjalankan kegiatan reses ke masyarakat. Dalam segi eksternal, kurangnya pemahaman politik masyarakat juga menjadi kendala yang perlu ditangani dengan serius. Oleh karena itu, anggota DPRD perlu mengambil langkah-langkah konkret dengan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan reses, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Dengan demikian, diharapkan kegiatan reses dapat lebih efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan konstituen dengan lebih baik

6.2 Saran

1. Peneliti sarankan kepada anggota DPRD Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektivitas dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dengan memperkuat sistem komunikasi politik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terbuka secara rutin dengan masyarakat, memanfaatkan media sosial dan situs web resmi untuk memperluas jangkauan pesan, serta mengimplementasikan mekanisme umpan balik yang transparan dan responsif. Dengan cara ini, anggota DPRD dapat lebih aktif berinteraksi dengan konstituennya, memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan solusi yang sesuai dengan aspirasi mereka. Dengan demikian, proses komunikasi politik yang kuat akan memperkuat hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif
2. Saran untuk penelitian berikutnya yang akan mengeksplorasi peran

anggota DPRD Provinsi Lampung dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat adalah untuk mendalami lebih lanjut metode komunikasi dan strategi yang efektif antara anggota DPRD dan beragam kelompok masyarakat untuk memastikan representasi yang inklusif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto, dkk (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:RinekeCipta, Hal 25.
- Campbell (1989). Riset dalam Efektifitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta:Erlangga.
- David Berry (1995). Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta:Raja Grafindo persada, 99.
- David Berry (1983). Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Cv Rajawali, hal 101.
- Efendy, OnongUchana (2005). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Horoeputri, Arimbi, Achmad Susantosa (2013). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta.
- Hurlock, E.B (1979). Personality Development. Mc Graw-Hill, New Delhi.
- Harun, Rochajat dan Sumarno (2006). Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung:Mandar Maju
- Handari, d (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- I Made Laut Mertha Jaya (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Yogyakarta:Quadrant, hlm 112.

- Indrawati (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 2.
- Kariem, M. Quranul, Akhbar, Alief, Oktarena, dan Chern Dwi (2022). Collaborative Governance Dalam Masa Reses DPRD Kabupaten Banyuasin. Jurnal Pemerintah dan Politik, 7(2).
- Muhammad Arni (2017) Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 65.
- Nimmo (1978). Political Communication and Public Opinion In America. California: Goodyear publishing Company
- Nasution (2001). Metode Research Ilmiah. Edisi I. Jakarta: Bumi Aksara-buku.
- Patilima (2004). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Raho, Bernard (2007). Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip (2008). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 24.
- Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Sukmadinata (2010). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu-buku.
- Sugiyono (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan E&P. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu dan Yonathan Wiyoso (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedia: Bandung
- Zuhri. 2012. Buku Panduan Reses. Pangkal pinang.

Jurnal

- Dilla, Ibnu Ubayd., Nasution, M. Arif dan Suriadi, Agus. (2017). Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. 4(2).
- Jannus T.H, S., & Manurung, S. (2020). Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Dalam Mengupayakan Aspirasi. *Jurnal Governance Opinion*, 5(1), 30–40.
- Sari, Dessi Permata. Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa reses Tahun 2014.
- Salman, Muhammad (2009). Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008. Program Studi Magister Ilmu Pembangunan Universitas Sumatra Utara Medan.
- Soejono Soekanto (1990). Pengantar Sosiologi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wenas, Erika Sisilia, Kimbal, Alfon dan Kumayas, Neni. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. *Jurnal Governance*. Vol. 1, No. 2. ISSN: 2088-2815

Peraturan perundang-undangan

- Undang –Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. hasil amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 2014
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Pasal 81 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.